

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan di Indonesia tidak lepas dari prinsip negara yang telah disepakati dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Disebutkan dalam pasal ini bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechtstaat*) bukan atas dasar kekuasaan (*machtstaat*). Negara hukum dalam hal ini bertugas untuk melindungi segenap kepentingan bangsa dengan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya.

Hukum merupakan norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita dalam keadaan tertentu, hukum merupakan karya-karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Untuk menjaga peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung lurus dan diterima oleh seluruh masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.¹

Tetapi tidak semua orang mampu menaati peraturan hukum tersebut. Supaya peraturan hukum itu dapat ditaati dan dipatuhi menjadi kaedah hukum, maka diperlukan adanya suatu norma yang memaksa seseorang untuk mentaatinya supaya tidak dikenakan sanksi. Jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga timbul permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku, dimana salah satunya adalah hukum pidana.

¹ C.S.T. Kansil, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 14.

Hukum pidana merupakan hukum publik, artinya bahwa hubungan hukum yang diatur terletak pada kepentingan orang banyak, yang diwakili oleh pemerintah.² Dengan demikian, hukum publik dapat diartikan jika kepentingan yang hendak dilindungi dan juga pihak yang mempertahankan kepentingan tersebut bersangkutan dengan kepentingan umum, maka hal ini yang menjadikan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik.

Secara umum tujuan hukum pidana adalah menciptakan ketertiban, keadilan dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan jalan kehidupan dan melindungi atau individu kepentingan masyarakat atau kolektifitas serta kepentingan negara atau pemerintah dari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikannya.³ Dengan adanya tujuan hukum pidana tersebut, maka sanksi pidana merupakan sarana untuk mencapai hukum pidana yang sesungguhnya melainkan bukan sebagai tujuan akhir dari hukum pidana.

Hukum pidana di Indonesia, dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku untuk umum. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum.⁴ Aturan tentang pembagian hukum pidana umum tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus tercantum dalam perundang-undangan diluar KUHP.

Salah satu yang diatur dalam hukum pidana khusus adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Surakarta: UMS Press, hal. 26.

³ *Ibid.* hal. 314.

⁴ *Ibid.* hal. 23.

1997 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Awal tahun 2014 lalu, melalui berita di media massa, baik media cetak maupun elektronik, banyak yang memberitakan tentang kasus pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang terjadi di dalam masyarakat sudah sangat memprihatinkan. Pengadilan Negeri Bali pada 2004 memvonis Schapelle Leigh Corby 20 tahun penjara setelah terbukti menyelundupkan 4,2 kilogram mariyuana atau ganja ke Bali. Kemudian Corby mendapatkan serangkaian pengurangan masa hukuman. Awal Februari lalu, Corby mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi hukumannya selama lima tahun pada 2012. Selain itu pengurangan terhadap terpidana narkotika asal Australia ini juga dilakukan melalui pemberian remisi.⁵

Tidak ada satupun negara di dunia kita ini yang mentolelir perdagangan/peredaran bebas narkotika. Termasuk negara tempat memproduksi (*secara ilegal*) benda haram tersebut seperti Thailand, Colombia dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya secara material mendatangkan keuntungan sebagian bagi penduduknya.⁶

Upaya menindakan dan penegakan hukum di Indonesia yang dikeluarkan banyak pihak adalah sanksi hukumnya yang dianggap sangat ringan. Vonis-vonis semacam ini seolah justru menjadi daya tarik bagi para pemain lain untuk

⁵ Voaindonesia.com, Rabu, 5 Maret 2014, *Kasus Pembebasan Bersyarat Corby*, <http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-ri-akan-tinjau-kembali-pembebasan-bersyarat-corby/1864433.html>. Diakses Senin, 12 Mei 2014, 14:18 WIB.

⁶ Hadiman. 1996. *Perlakuan barang haram ecstasi narkotika seperti barang haram lainnya*. Jakarta. Hal.3

bergabung. Bisnis narkoba di Indonesia menjadi sangat menarik karena menjanjikan keuntungan yang sangat besar, dengan resiko yang relatif kecil. Jika seorang pelaku sampai tertangkap, paling-paling hanya dihukum penjara yang ringan. Kemudian ternyata dari dalam penjara pun, ada yang masih bisa menjalankan bisnisnya, semisal yang dilakukan Alip Cahyadi, Yong Andiarana dan Roni Widjaja.⁷

BNN telah menyita barang bukti ratusan ribu kilogram narkoba dari berbagai jenis. Diantaranya, 132 ribu lebih gram sabu, 215 gram heroin, 179 gram serbuk ekstasi, 26 ribu lebih butir pil ekstasi, 13 ribu lebih gram ganja, 35 gram precursor, 146 gram ephedrine, 85 butir tablet methamphetamine, 588 butir tablet happy five dan 323 ribu lebih milliliter prekursor cairan. Semua barang bukti telah dimusnahkan. Selama Tahun 2013 telah ditemukan sebanyak 24 NPS (New Psychoactive Substance) atau narkoba jenis baru.⁸ Hal ini membuktikan bahwa jaringan narkoba di Indonesia semakin luas, dan secara langsung dapat menyebabkan bertambahnya pelaku dan juga korban narkoba. Secara tidak langsung hal ini dapat mencerminkan lemahnya penegakan hukum narkoba di Indonesia.

Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba, meskipun pemerintah telah mengeluarkan produk hukum yang diharapkan mampu untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba melalui Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Namun

⁷ Ibid, 1999, *Narkoba Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Primer Koperasi Mitra Usaha Sbmimas Polri, hal. 28-29.

⁸ Voaindonesia.com, Kamis, 18 Juli 2013, *Kasus Narkoba di Indonesia* :<http://www.voaindonesia.com/content/bnn-tangkap-244-pengedar-narkoba-selama-2013/1816024.html>. Di download Kamis, 06 Maret 2014, 12:10 WIB.

dalam peraturan perundang-undangan yang lain, yaitu undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan tentang hak-hak narapidana, salah satunya adalah hak mendapatkan remisi setiap tahun yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dengan adanya dua produk hukum tersebut yang saling bertentangan, maka mengakibatkan tidak adanya jera bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Dalam Surat Edaran yang dikeluarkan Dirjen Pemasyarakatan, tertanggal 16 Juli 2013. SE ini merupakan juklak dari SE yang diterbitkan Menkum-HAM. Menyatakan bahwa PP Nomor 99/2012 berlaku untuk napi yang putusannya berkekuatan hukum tetap sejak 12 November 2012. Surat Edaran tersebut menetapkan bagi narapidana khusus narkoba yang hukuman penjaranya kurang dari lima tahun, maka syarat pemberian remisi disamakan dengan napi tindak pidana umum. Ketentuan khusus remisi bagi napi narkoba dikeluarkan, tujuannya untuk mengatasi persoalan over kapasitas, yang terjadi di hampir seluruh lapas di Indonesia.⁹

Maka Berdasarkan alasan yang tertuang dalam surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), terkesan bahwa remisi bagi tindak pidana narkotika dapat dipermudah, hal ini yang mengakibatkan tidak adanya jera serta tidak memberikan dampak (*deterrent effect*) terhadap para pelakunya. Karena seharusnya jika pemerintah dengan tegas ingin memberantas tindak pidana narkotika, maka dengan alasan yang tegas segala peraturan yang

⁹ Lihat Jpnn.com, Kamis, 20 Desember 2013, *Remisi Narkotika di Indonesia*, <http://www.jpnn.com/read/2013/07/18/182358/Remisi-Napi-Kasus-Narkoba-Dipermudah.html>. Diakses Kamis, 06 Maret 2014, 12:30 WIB.

bersifat meringankan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba tidak diterbitkan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan agar mempermudah terhadap permasalahan yang akan dibahas. Adapun rumusan masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana regulasi yang mengatur tentang remisi di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi pemenuhan hak mendapatkan remisi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta?
3. Apa hambatan pemberian remisi bagi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

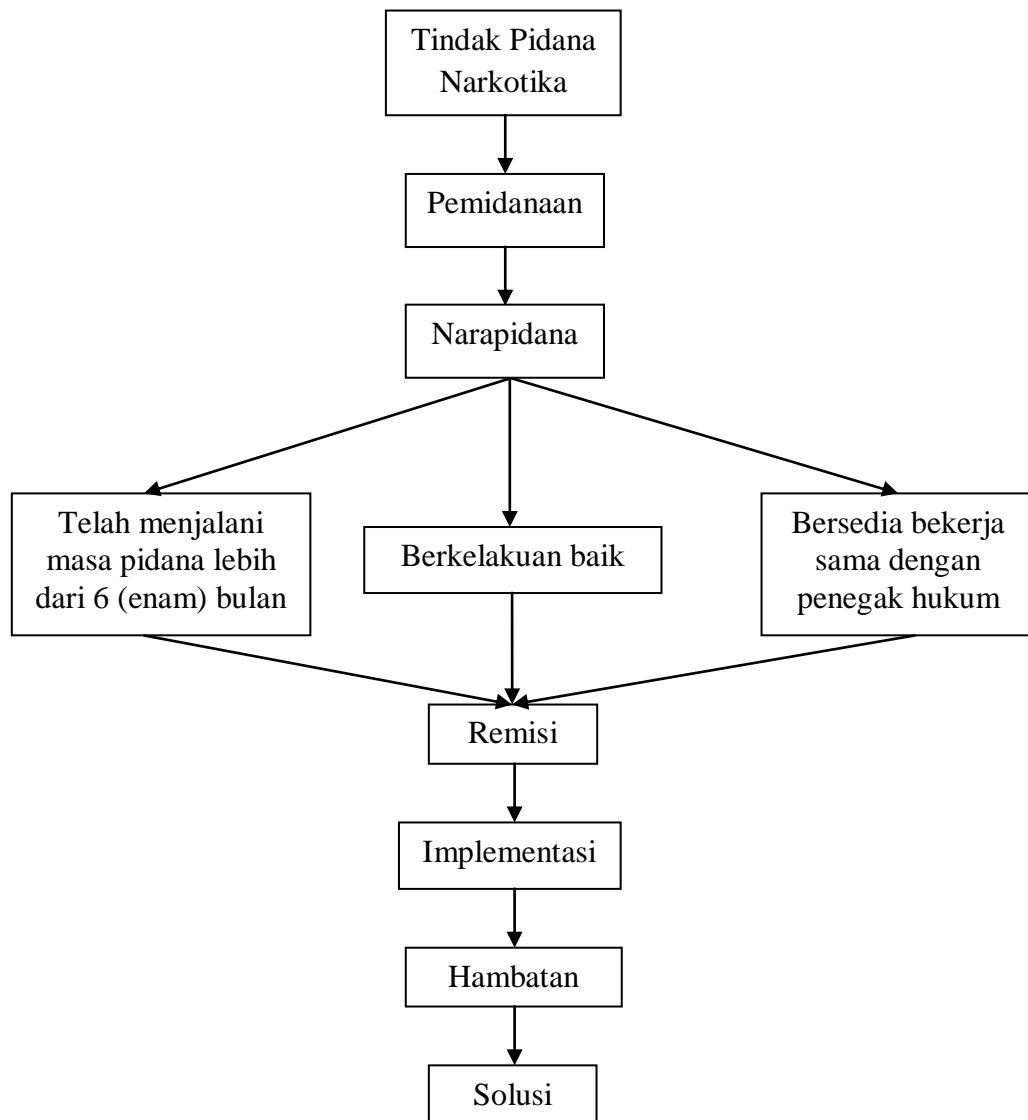
1. Untuk mengetahui bagaimana regulasi yang mengatur tentang remisi.

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak mendapatkan remisi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui apa hambatan pemberian remisi bagi narapidana narkoba di Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta.

Selain memiliki tujuan, suatu penelitian juga terdapat manfaat yang diharapkan oleh penulis setelah melakukan suatu penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mengenai pemberian masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkoba.
2. Hasil Penelitian ini mampu bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai pemberian masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkoba.
3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam bidang hukum, khususnya mengenai pemberian masa pidana (remisi) terhadap tindak pidana narkoba.

D. Kerangka Pemikiran



Narkotika merupakan jenis obat-obatan yang sangat berbahaya dan juga merupakan masalah serius dari beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia. Hampir setiap tahun beberapa orang terjebak di dalamnya, baik itu sebagai pemakai, penjual sampai pengedar. Ironisnya masalah tersebut kurang dipedulikan oleh pemerintah. Beberapa kasus besar tindak pidana narkotika di Indonesia setiap tahunnya selalu mendapat remisi, hal ini yang selalu diresahkan oleh sebagian masyarakat.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya kebanyakan undang-undang tindak pidana di luar KUHP rumusan ketentuan pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP.

Terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang tersebut, hukum harus tetap ditegaskan. Hukum berfungsi sebagai pengendalian sosial (*sosial control*, memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Adapun tujuannya, agar hukum dapat diberlakukan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dengan adanya sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, diharapkan mampu untuk mengurangi tindak pidana narkotika di Indonesia, tetapi peraturan lain justru bersifat terbalik dengan norma tersebut, yaitu dengan adanya pengurangan masa pidana (*remisi*) yang diberlakukan terhadap tindak pidana narkotika.

Peraturan umum tentang remisi dijelaskan pada Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi :

“bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana”.

Ketentuan tersebut dapat diberikan setelah pelaku tindak pidana menerima putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pelaku menjalani masa hukuman yang telah dijatuhkan oleh majelis. Peraturan lain, yang mempermudah remisi bagi narapidana Narkotika adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas

¹⁰ Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hal. 6.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan :

“bahwa remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat:

a. berkelakuan baik; dan

b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.”

Selain ketentuan Pasal 34 ayat (2) tersebut, syarat remisi terhadap tindak pidana narkoba juga ditambah dengan ketentuan Pasal 34A yaitu:

“bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.”

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberatan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkoba untuk pembuat narkoba. “pemberatan sanksi pidana” ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberatan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.¹¹

Di satu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, di sisi lain juga

¹¹ Sujono & Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 212.

tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

E. Metode Penelitian

Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Yaitu pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.¹² Metodologi Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹³

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta (*individu, kelompok atau keadaan*) dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi.¹⁴ Di dalam penelitian deskriptif mempunyai dua tujuan yaitu pertama adalah untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu. Kedua yaitu untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.¹⁵

¹² Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hal.19.

¹³ Khudzaifah Dimiyati, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS Press, hal. 4.

¹⁴ Rianto Adi, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hal.58.

¹⁵ Soleman B.Taneko, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 108.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁶ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.¹⁷ Dalam penelitian ini data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.¹⁸

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta, karena lapas tersebut merupakan LP percontohan di Indonesia dan juga dalam rangka HUT RI ke 67 total remisi yang terdapat di kota Yogyakarta sebanyak 769 napi, dan sebagian besar terdapat di lapas narkotika kelas II A Yogyakarta sebanyak 205.¹⁹

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat, yaitu data langsung dari tempat penelitian dan juga melalui sejumlah keterangan dalam bentuk wawancara secara sistematis dengan pihak-pihak yang diperlukan di

¹⁶ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, 2012, *Penelitianf Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.13.

¹⁷ Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Loc.Cit.*, hal. 7.

¹⁸ Soejono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 12.

¹⁹ News.detik.com, Kamis, 16 Agustus 2012, 13:53 WIB, *Remisi di Yogyakarta*, <http://news.detik.com/read/2012/08/16/135344/1993246/10/769-napi-di-diy-terima-remisi?nd771108bcj.html>. Diakses Kamis, 06 Maret 2014, 13:30 WIB.

dalam penelitian ini, yaitu pihak yang berwenang di Lapas Narkotika Kelas II A Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan menganalisis bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
 - g. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi;

- h. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang Ampunan Istimewa
- i. Surat Edaran yang dikeluarkan Dirjen Pemasyarakatan, tertanggal 16 Juli 2013. SE ini merupakan juklak dari SE yang diterbitkan Menkum-HAM.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Data ini dipeoleh dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku dan bahan-bahan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu melalui peraturan-peraturan serta data tertulis dari buku yang terkait dengan pemberian masa pidana (remisi) terhadap narapidana narkoba.

b. Penelitian lapangan

Data ini diperoleh dari hasil penelitian secara langsung dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan bapak Muhammad Syukron Anshor, AMD.IP., SH, selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, Bapak Tri Suwarno, S.PD., MA, selaku Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta, dan Ibu Pupung Rahayu,

²⁰ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 95.

S.Sos, selaku Sub Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika
Klas IIA Yogyakarta

6. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹ Sesuai dengan jenis data, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, wawancara, pengamatan dan dokumentasi.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mengetahui dan mempermudah dalam memperoleh gambaran dalam skripsi ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

Bab II, berisi uraian dasar teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi : Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum Tentang Pengurangan Masa Pidana (Remisi).

Bab III, dalam bab ini menulis membahas dan menguraikan: Gambaran umum lokasi penelitian, Regulasi yang mengatur tentang remisi, Implementasi pemenuhan hak mendapatkan remisi narapidana narkotika di Lapas Narkotika

²¹ Lexy J. Moelong, 2000, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosda Karya, hal. 3.

Kelas II A Yogyakarta, Hambatan pemberian remisi bagi narapidana narkoba di
Lapas Narkoba Kelas II A Yogyakarta, Solusi atau upaya mengatasi hambatan
pemberian remisi bagi narapidana narkoba.

Bab IV, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.